

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PT ME TERKAIT
UNION BUSTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

Nama: Yansen Simhanandi

Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan PT ME yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dapat dikualifikasi melanggar ketentuan Pasal 28 jo Pasal 43 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. PT ME memutus hubungan kerja terhadap para pekerja yang tergabung dalam PPA PPMI PT ME, lalu para pekerja telah melakukan mediasi dengan PT ME tetapi masih belum menemukan titik tengah, lalu kasus ini berlanjut di pengadilan negeri Bandung dan dimenangkan oleh para Pekerja, tetapi PT ME mengajukan kasasi dan hasilnya diputus bahwa PT ME bersalah dan wajib melaksanakan hasil putusan pengadilan. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. PT ME yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 28 jo Pasal 43 dari Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. PT ME pun dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan model pertanggungjawaban pidana korporasi bahwa korporasi yang berbuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Kata Kunci: Korporasi, *Union Busting*, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Ketenagakerjaan

**PT ME CORPORATE CRIMINAL LIABILITY RELATED TO UNION
BUSTING REVIEWED FROM ACT NO. 21 OF 2000 ON TRADE UNIONS
AND ACT NO. 13 OF 2003 ON MANPOWER**

Name: Yansen Simhanandi

Discipline/Study Programme: Law/ Legal Studies

Contributor:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this essay is to be able to find out whether PT ME's actions to terminate employment unilaterally can be qualified to violate the provisions of Article 28 in Act No. 13 of 2003 on Manpower.. PT ME cut off employment relations with workers who are members of the PPA PPMI PT ME, then the workers have mediated with PT ME but still have not found a midpoint, then the case continues in the Bandung district court and won by the Workers, but PT ME submits cassation and the results are decided that PT ME is guilty and is obliged to implement the results of the court's decision. The conclusions are as follows: Trade unions aim to provide protection, defense of rights and interests, and improve the welfare of workers / laborers and their families. PT ME which has unilaterally terminated employment has fulfilled the elements as Article 28 jo Article 43 of the Labor Union / Labor Union Law. PT ME can also be subject to corporate criminal liability based on the corporate criminal liability model that corporations do and are also responsible.

Keywords: Corpotate, Union Busting, Trade Unions, Manpower